

Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Collaborative Governance in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungbanteng District, Banyumas Regency

Khafni Arij Elani¹, Indah Ayu Permana Pribadi², Chamid Sutikno³, Ariesta Amanda⁴, Zaula Rizqi Atika⁵

¹²³⁴⁵Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

* Correspondence e-mail; khafniae@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/12/07; Revised: 2024/12/21; Accepted: 2025/01/24

Abstract

This research analyzes the implementation of *Collaborative Governance* in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungbanteng District, Banyumas Regency. *Collaborative Governance* involves various stakeholders, including government, the private sector, and civil society, to create comprehensive and sustainable solutions. Data from the Banyumas Regency Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises shows a significant increase in the number of MSMEs from 2017 to 2021, with micro MSMEs dominating in Kedungbanteng District. This research highlights the important role of the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Dinnakerkop) and Bank Indonesia in supporting MSMEs. Bank Indonesia supports access to financing and digitalization, while Dinnakerkop provides training and strengthens the capacity of MSMEs. Collaboration with the private sector, such as ASPIKMAS, is also important. The successful example from Banyuwangi Regency shows that *Collaborative Governance* can increase the competitiveness of MSMEs through innovation and wider market access. This research aims to find out how effective and sustainable the collaboration process is in developing MSMEs in Kedungbanteng District to improve the performance and competitiveness of MSMEs.

Keywords

Banyuwangi; Collaborative Governance; MSMEs;



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Collaborative Governance adalah sebuah pendekatan dalam tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak melalui partisipasi yang aktif, transparansi, dan akuntabilitas (Das, 2023). Dengan mengedepankan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, *Collaborative Governance* memungkinkan terbentuknya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi masalah kompleks yang memerlukan kerjasama dan koordinasi multi-pihak. Misalnya, dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Mukhirto et al., 2022; Witjaksana et al., 2024), *Collaborative Governance* dapat memainkan peran penting dengan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui proses ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan dan tepat sasaran, tetapi juga memiliki dukungan luas dari berbagai stakeholder, yang pada gilirannya meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Collaborative Governance memberikan kerangka kerja yang memungkinkan setiap pihak untuk berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing (Maulia, 2023). Dalam konteks pengembangan UMKM, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah yang menyediakan regulasi dan fasilitasi, pelaku UMKM sebagai aktor utama penggerak ekonomi lokal, serta lembaga pendukung lainnya yang berfungsi menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dirumuskan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang inklusif, seperti peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan strategis, yang disesuaikan dengan kebutuhan konkret pelaku UMKM. Sementara itu, peran komunitas lokal menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan melalui penguatan jaringan sosial dan dukungan langsung kepada UMKM.

Pendekatan *Collaborative Governance* juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Riyanto & Alfirdaus, 2024). Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kepercayaan di antara para stakeholders dapat terbangun, menciptakan hubungan kemitraan yang solid dan berorientasi pada tujuan bersama. Dimensi horizontal dalam collaborative governance, yang menekankan kesetaraan di antara para stakeholders, menjadi kunci untuk memastikan proses pengambilan keputusan berjalan tanpa dominasi pihak tertentu.

Menurut Ansel dan Gash (2008), *Collaborative Governance* digunakan sebagai strategi baru untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu tempat dan mencapai konsensus mengenai cara menyelesaikan permasalahan publik (Maulana et al., 2024). Ide dasar yang dapat dipahami adalah adanya aktor-aktor swasta dan publik (pemerintah dan non-pemerintah) yang memiliki kepedulian yang sama dan bekerja sama untuk berhasil menyelesaikan permasalahan publik. Ide ini juga merupakan strategi umum dalam literatur administrasi publik. Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, *Collaborative Governance* dapat melibatkan berbagai inisiatif seperti penyediaan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dan penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi yang mendukung dan program-program insentif, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dengan investasi dan teknologi. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran dalam advokasi dan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan demikian, setiap pihak membawa keahlian dan sumber daya masing-masing ke meja kolaborasi, menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif untuk tantangan yang dihadapi UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yang tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM juga menjadi penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja, mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja. Di tingkat lokal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sering menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan peluang kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata di komunitas-komunitas.

Meskipun memiliki peran penting ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan mereka. Tantangan-tantangan ini termasuk keterbatasan akses ke modal, kendala dalam mengadopsi teknologi baru, kesulitan dalam mencapai pasar yang lebih luas, dan rendahnya kapasitas manajerial di kalangan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM agar mereka dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 86.975

UMKM di Kabupaten Banyumas yang menyerap 129.182 tenaga kerja. Jumlah UMKM binaan dinas juga meningkat secara signifikan, dari 6.720 pada tahun 2017 menjadi 24.978 pada tahun 2021. Berikut adalah data jumlah UMKM, UMKM binaan dinas, dan jumlah tenaga kerja dari tahun 2017 hingga 2021:

Table 1 Data UMKM Binaan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Deskripsi Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM	66.973	85.984	86.228	86.645	86.975
Jumlah UMKM Binaan Dinas	6.720	6.720	8.653	19.865	24.978
Jumlah Tenaga Kerja	95.955	126.986	128.118	128.952	129.182

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021.

Kecamatan Kedungbanteng adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan potensi UMKM yang cukup besar. Kecamatan Kedungbanteng memiliki 2.636 UMKM mikro tanpa UMKM kecil atau menengah, menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sebagai perbandingan, Kecamatan Cilongok memiliki jumlah UMKM mikro yang lebih besar, yaitu 6.149, serta satu UMKM menengah. Kecamatan Wangon menonjol dengan 41 UMKM menengah, menunjukkan keragaman dan potensi pertumbuhan UMKM yang berbeda di setiap kecamatan.

Aspikmas Kecamatan Kedungbanteng mencatat total 82 pelaku UMKM tergabung pada tahun 2022, menunjukkan adanya organisasi lokal yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM di tingkat desa.

Table 2 Data Aspikmas Kecamatan Kedungbanteng

Desa	Jumlah UMKM tergabung	Tahun
Beji	13	2022

Karang Nangka	12	2022
Windujaya	10	2022
Kalikesur	9	2022
Keniten	8	2022
Dawuhan Wetan	7	2022
Kalisalak	5	2022
Karang Salam	5	2022
Melung	4	2022
Kebocoran	3	2022
Kutaliman	2	2022
Dawuhan Kulon	2	2022
Kedungbanteng	1	2022
Baseh	1	2022
Jumlah Total	82 Pelaku UMKM tergabung	

Sumber Data: Sekretaris Aspiemas Kecamatan Kedungbanteng.

Dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Program pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, serta fasilitasi pameran dan promosi produk UMKM merupakan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi juga menjadi strategi penting dalam mendukung UMKM di daerah ini. Salah satu contoh sektor swasta yang terlibat aktif adalah ASPIKMAS (Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas). ASPIKMAS berperan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar bagi UMKM, serta menjembatani komunikasi antara UMKM dan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM (Dinakerkop UKM) Kabupaten Banyumas mengelola program pelatihan dan pembiayaan untuk UMKM.

Penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM telah terbukti efektif di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, penerapan *Collaborative Governance* antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal berhasil meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi produk dan akses pasar yang lebih luas. Program seperti "Smart Kampung" di Banyuwangi memanfaatkan teknologi untuk mendukung UMKM, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung digitalisasi UMKM. Hasil positif dari berbagai daerah ini menjadi dasar untuk mencoba menerapkan pendekatan serupa di

Kecamatan Kedungbanteng. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta seperti Aspiemas (Asosiasi Pedagang Mikro Kecil Kabupaten Banyumas) diharapkan pengembangan UMKM di Kedungbanteng dapat lebih optimal, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan “*Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di daerah tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam dan pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM secara lebih holistik. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Kedungbanteng, mengingat kecamatan ini memiliki jumlah UMKM yang signifikan dan merupakan bagian penting dari perekonomian lokal. Dengan memilih lokasi ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji potensi UMKM serta upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sasaran penelitian mencakup perwakilan dari pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dan pelaku UMKM. Perwakilan pemerintah yang dimaksud adalah individu dari lembaga atau dinas terkait yang mengelola program pemberdayaan UMKM. Sektor swasta meliputi pengusaha atau pemilik usaha yang terlibat dalam inisiatif kemitraan, sedangkan masyarakat dan pelaku UMKM adalah individu yang menerima manfaat dari program pemberdayaan.

Fokus penelitian ini adalah penerapan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005). Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah publik, serta memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam konteks pengembangan UMKM.

Table 3 Fokus Penelitian

Fokus	Aspek	Sub Aspek
-------	-------	-----------

Penelitian		
<i>Collaborative Governance</i>	Dimensi Vertikal	1. Interaksi dengan Pemerintah 2. Komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah
Dalam Pemberdayaan UMKM	Dimensi Horizontal	1. Kerjasama dengan pelaku UMKM dan Organisasi Non-Pemerintah
di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Hubungan Kemitraan	1. Integrasi Dukungan dan kolaborasi 2. Tantangan sosial 3. Evaluasi keberhasilan kolaborasi

Sumber: Diolah dan diadaptasi dari teori *Collaborative Governance* Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005).

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang proses yang diteliti. Data yang diperoleh dibedakan menjadi dua sumber: data primer, yang didapat melalui wawancara langsung dan observasi di lapangan, serta data sekunder, yang diperoleh dari arsip, laporan, dan dokumentasi yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari informan, sedangkan observasi memberikan konteks nyata tentang situasi di lapangan. Dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen publik yang dapat mendukung penelitian.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman, yang melibatkan empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Kedungbanteng

Kecamatan Kedungbanteng, yang terletak di sebelah barat daya Kabupaten Banyumas, memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh perbukitan di lereng Gunung Slamet. Wilayah ini kaya akan potensi pertanian dan perkebunan, serta berkembang pesat dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk unggulan lokal, seperti makanan olahan, kerajinan tangan, dan hasil bumi, dihasilkan oleh pelaku UMKM yang turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal.

Pengembangan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, aktif memberikan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran. Sektor swasta, bersama dengan asosiasi masyarakat seperti ASPIKMAS, turut berperan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperluas jaringan pemasaran, baik di tingkat lokal maupun regional. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM agar dapat berkompetisi di pasar yang lebih luas. Penelitian ini tertarik untuk mengeksplorasi penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di Kedungbanteng, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Dalam konteks ini, *Collaborative Governance* menjadi kerangka kerja yang penting untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM (Dinnakerkop), ASPIKMAS, Bank Indonesia, serta pelaku UMKM. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akses permodalan, dan daya saing UMKM melalui sinergi lintas sektor.

Pendekatan *Collaborative Governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Teori Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005) mengidentifikasi tiga dimensi kunci dalam kolaborasi: dimensi vertikal, horizontal, dan hubungan kemitraan (Hu et al., 2020). Dimensi vertikal mencakup hubungan hierarkis antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku UMKM. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan strategis, sementara pemerintah daerah, melalui Dinnakerkop, mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai kebutuhan lokal. Program pelatihan manajerial dan digitalisasi yang dilaksanakan Dinnakerkop dengan dukungan Bank

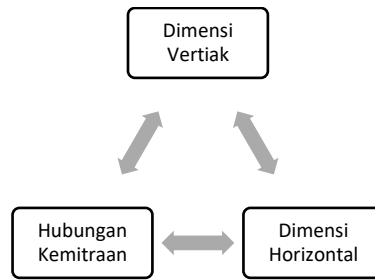
Indonesia menjadi contoh nyata penerapan dimensi ini. Pelatihan tersebut membantu UMKM meningkatkan kompetensi dalam manajemen usaha dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar.

Dimensi horizontal melibatkan kolaborasi lintas sektoral, seperti kerjasama antara Dinnakerkop, ASPIKMAS, dan Bank Indonesia untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif. Studi Ajis Setiawan (2022) tentang pengelolaan BUMDes di Purbalingga menunjukkan bahwa pelibatan pihak eksternal memperkuat dampak ekonomi lokal (Yopanggi & Setiawan, 2022). Dalam konteks Kedungbanteng, kolaborasi dengan lembaga keuangan, asosiasi UMKM, dan swasta membuka akses terhadap sumber daya dan jaringan pasar yang lebih luas. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Indonesia, misalnya, memberikan pembiayaan berbunga rendah yang mendukung UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi.

Hubungan kemitraan adalah dimensi terakhir yang menekankan pentingnya partisipasi aktif UMKM dalam seluruh proses kolaborasi. Penelitian Mohamad Ichsana Nur et al. (2022) pada program UMKM Juara di Jawa Barat menunjukkan bahwa ketidakoptimalan kolaborasi sering kali disebabkan oleh minimnya monitoring dan distribusi kapabilitas yang tidak merata (Nur et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berbagi visi dan tujuan melalui mekanisme komunikasi yang intensif. Di Kedungbanteng, pendekatan ini dilakukan melalui diskusi rutin, evaluasi bersama, dan penggunaan teknologi digital untuk memastikan keterlibatan semua pihak.

Hasil wawancara dengan sekretaris Dinnakerkop UKM Banyumas menggarisbawahi bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* bergantung pada komunikasi yang efektif, monitoring berkala, dan keselarasan tujuan antar-pihak. Bank Indonesia, misalnya, tidak hanya menyediakan akses permodalan tetapi juga mendukung pelatihan yang meningkatkan daya saing UMKM. Dengan keterlibatan yang inklusif dan intensif, UMKM di Kedungbanteng mampu mengembangkan produk inovatif, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Melalui penerapan dimensi vertikal, horizontal, dan kemitraan, *Collaborative Governance* menjadi solusi strategis untuk mendukung pengembangan UMKM. Sinergi yang terbangun antara pemerintah, asosiasi, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM memastikan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang berkelanjutan.



Gambar 1 Pola *Collaborative Governance* menurut Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005). Diolah dari teori *Collaborative Governance* Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005).

3.2. Dimensi Vertikal

Dimensi vertikal dalam *Collaborative Governance* mengacu pada hubungan hierarkis antara tingkat pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya atau pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pengembangan UMKM, hubungan ini diwujudkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM di tingkat lokal. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, serta menyediakan sumber daya yang kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah untuk diimplementasikan secara spesifik sesuai kebutuhan lokal. Di tingkat daerah, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM (Dinnakerkop) memainkan peran strategis sebagai perantara kebijakan pusat dan pelaku UMKM, sekaligus menjadi fasilitator utama dalam pelaksanaan program-program pengembangan seperti pelatihan manajerial dan digitalisasi.

Salah satu contoh konkret adalah program pelatihan manajerial dan digitalisasi yang dilaksanakan oleh Dinnakerkop dengan dukungan Bank Indonesia (BI). Pelatihan manajerial bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam perencanaan keuangan, manajemen SDM, dan inovasi produk. Sementara itu, pelatihan digitalisasi membantu pelaku UMKM memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, manajemen inventaris, hingga transaksi online, yang semakin relevan di era digital. Program ini tidak hanya memperkuat kapasitas pengelolaan usaha tetapi juga mendorong UMKM untuk lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.

Bank Indonesia juga berperan penting dalam mendukung sektor UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menawarkan pinjaman berbunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Selain itu, BI turut mendukung pelatihan-pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui solusi keuangan inklusif dan pendampingan teknis. Kolaborasi antara Dinnakerkop dan BI ini menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, memberikan akses pasar baru, serta memperkuat kompetensi pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan modernisasi.

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan dan program berjalan optimal. Forum diskusi, pelatihan, serta musyawarah rutin menjadi wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan solusi bersama. Melalui interaksi yang intensif, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan spesifik UMKM lokal.

Keberhasilan dimensi vertikal ini sangat bergantung pada koordinasi lintas tingkat yang harmonis. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sinergi berbagai pihak seperti Bank Indonesia, pelaku UMKM di Kecamatan Kedungbanteng mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menciptakan inovasi produk yang lebih unggul, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing ekonomi daerah.



Gambar 2 pelatihan Digital Marketing oleh Dinakerkop terhadap Pelaku UMKM

Sumber : Dokumen Sekretaris Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas

Pemerintah secara aktif mengadakan pertemuan dengan pelaku UMKM untuk memberikan informasi terkait regulasi terkini, peluang pasar, serta cara mengakses permodalan. Pertemuan ini berfungsi sebagai wadah dialog, memungkinkan pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, serta mendapatkan penjelasan terkait kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris UKM Kabupaten Banyumas, sosialisasi yang dilakukan pemerintah sangat membantu pelaku UMKM dalam memahami perubahan kebijakan, regulasi baru, dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Selain memberikan informasi kebijakan terkini, sosialisasi ini membuka ruang diskusi untuk membahas strategi adaptasi UMKM terhadap perubahan pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku UMKM dapat menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian Ichsana Nur et al. (2022), yang menekankan bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah adalah faktor kunci untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan (Nur et al., 2022).

Penelitian Hilmi Rahman Ibrahim (2022) juga menunjukkan pentingnya kolaborasi berbasis teknologi untuk memberdayakan UMKM (Ibrahim, 2022). Di Kecamatan Kedungbanteng, penguatan Collaborative Governance, seperti pemanfaatan media digital untuk pemasaran, mampu membantu UMKM memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan modernisasi.



Gambar 3 Pelatihan Pembuatan Abon Lele

Sumber : Dokumen Sekretaris Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas

Pemerintah mendukung pelaku UMKM melalui sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan efisiensi produksi. Pelatihan ini memberikan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan langsung, mempersiapkan UMKM menghadapi persaingan pasar. Forum diskusi rutin antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi wadah aspirasi, berbagi tantangan, dan mencari solusi bersama. Interaksi melalui forum tatap muka atau media digital, seperti grup WhatsApp, memperkuat komunikasi, memastikan kebijakan relevan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas tingkat dalam *Collaborative Governance* untuk meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan UMKM secara efektif dan berkelanjutan.

3.3. Dimensi Horizontal

Dimensi horizontal dalam *Collaborative Governance* menekankan kolaborasi sejajar antar aktor lokal untuk menciptakan solusi berbasis kebutuhan setempat (Weber, Lovrich, & Gaffney, 2005). Di Kecamatan Kedungbanteng, kolaborasi ini melibatkan tiga aktor utama. ASPIKMAS berperan sebagai wadah koordinasi antar pelaku UMKM, memungkinkan berbagi informasi dan jaringan. Pelaku UMKM lokal bekerja sama lintas sektor, menghasilkan produk inovatif berbasis potensi lokal. Sementara itu, komunitas lokal mendukung ekosistem UMKM sebagai konsumen utama dan peserta aktif dalam kegiatan kolaboratif. Sinergi ini memperkuat kapasitas, pasar, dan daya saing UMKM, menciptakan keberlanjutan ekonomi berbasis kekuatan lokal.

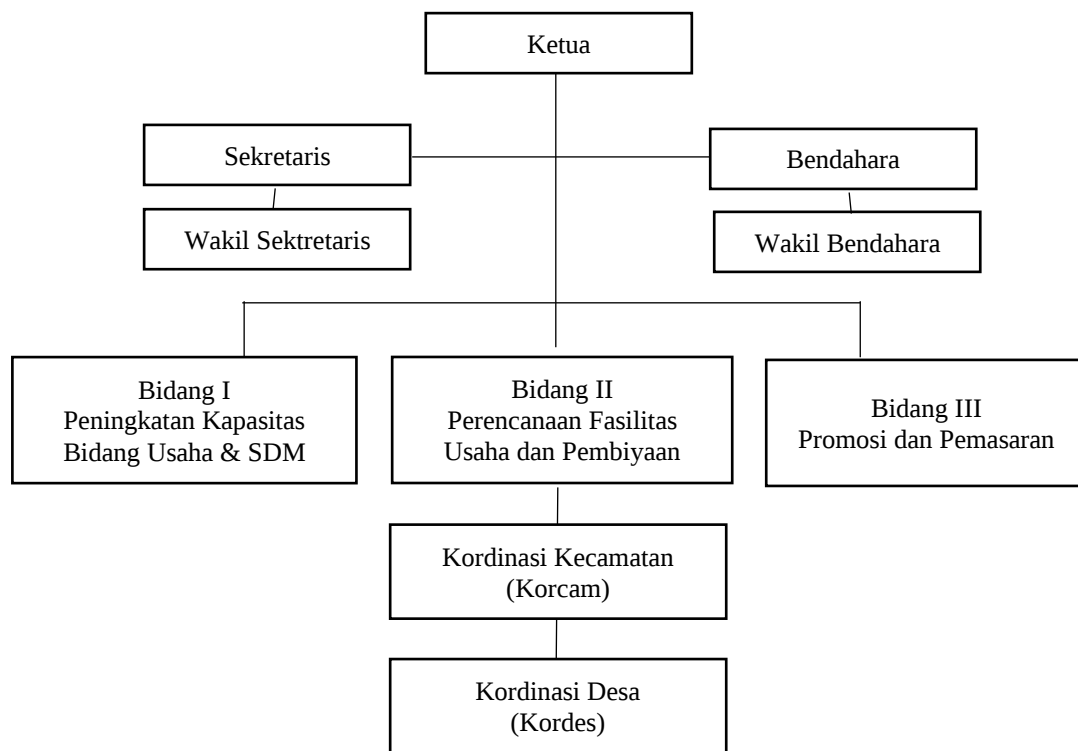


Table 4 Struktur Kepengurusan ASPIKMAS.

Sumber : Sekretaris ASPIKMAS Kabupaten Banyumas

Struktur organisasi yang sistematis dan terkoordinasi memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini tercermin dalam organisasi ASPIKMAS (Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas), khususnya di Kecamatan Kedungbanteng. Struktur ini dirancang untuk memastikan pembagian tugas yang jelas, efisiensi operasional, dan kolaborasi yang efektif dalam mendukung pelaku UMKM.

Pada posisi pimpinan utama, ketua memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengarahkan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bendahara bertugas mengelola aspek keuangan organisasi, mulai dari pencatatan hingga pelaporan dana, sedangkan sekretaris berperan dalam mengatur administrasi, dokumentasi, dan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Posisi wakil bendahara dan wakil sekretaris hadir untuk mendukung peran utama mereka serta mengambil alih tugas ketika diperlukan.

Selain posisi inti, ASPIKMAS juga memiliki tiga bidang utama dengan tugas spesifik. Bidang I fokus pada peningkatan kapasitas usaha dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini bertujuan mengembangkan keterampilan anggota ASPIKMAS dan meningkatkan kualitas produk UMKM agar lebih kompetitif. Bidang II bertanggung jawab terhadap perencanaan fasilitas usaha dan pembiayaan. Dalam

praktiknya, bidang ini merancang strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sekaligus menyediakan fasilitas pendukung untuk membantu perkembangan usaha. Sementara itu, Bidang III menangani promosi dan pemasaran. Tugas utama bidang ini adalah meningkatkan daya saing produk UMKM melalui strategi pemasaran yang efektif dan akses ke pasar yang lebih luas.

Di tingkat wilayah, ASPIKMAS juga memiliki struktur koordinasi yang mencakup Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes). Korcam bertindak sebagai penghubung antara tingkat desa dalam kecamatan, memastikan program-program ASPIKMAS berjalan terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, Kordes memainkan peran langsung di tingkat desa dengan mendampingi pelaku UMKM, menyampaikan kebutuhan lokal kepada Korcam, dan menjalankan program-program ASPIKMAS secara efektif.

Dengan pembagian tugas yang sistematis ini, ASPIKMAS mampu menjalankan perannya sebagai penghubung utama antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah. Organisasi ini juga memfasilitasi diskusi di antara anggota UMKM untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, ASPIKMAS menjadi wadah untuk menyampaikan solusi inovatif yang berasal langsung dari pelaku usaha.

Penelitian Wahyu Hidayat (2022) di Bangka Belitung memberikan gambaran tentang bagaimana kolaborasi yang efektif dapat menciptakan dampak positif bagi pelaku UMKM (Hidayat et al., 2022). Penelitian tersebut mengadopsi lima tahapan *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash, yaitu dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan tindakan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam digitalisasi UMKM di era Revolusi Industri 4.0 berhasil meningkatkan daya saing UMKM meskipun terdapat tantangan berupa keterampilan digital yang belum merata, terutama di kalangan pelaku UMKM yang lebih tua. Temuan ini relevan untuk Kecamatan Kedungbanteng, di mana literasi digital dan keterampilan teknologi menjadi elemen penting dalam memajukan UMKM.

Melalui pelatihan intensif dan dukungan akses teknologi, kolaborasi dapat menjadi faktor kunci untuk membantu UMKM lokal bersaing di pasar digital. Dalam hal ini, peran ASPIKMAS sangat strategis, khususnya dalam menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Dukungan yang diberikan pemerintah, seperti pelatihan manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan teknologi, menjadi pilar penting dalam pengembangan UMKM. Anggota ASPIKMAS juga menerima bantuan modal melalui skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan akses pasar melalui program pameran, ekspor, dan penggunaan platform digital.

Bimbingan teknis dari pemerintah, seperti pendampingan dalam pengurusan izin usaha dan standarisasi produk, turut meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian Akhmadi dan Listiyani (2022) yang menyoroti pentingnya struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa ASPIKMAS, sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah, memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan. Namun, ada perbedaan fokus dalam penelitian ini. Sementara penelitian ini menekankan dimensi vertikal dalam kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, penelitian Akhmadi dan Listiyani lebih menyoroti interaksi horizontal antar pelaku UMKM di tingkat lokal. Penekanan pada kolaborasi horizontal menambah wawasan tentang bagaimana ASPIKMAS dapat memperkuat sinergi lokal yang berbasis kekuatan komunitas.

Dengan adanya dimensi horizontal, ASPIKMAS mampu menjembatani hubungan antara UMKM dengan sektor lain yang selevel di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan sinergi lokal yang tangguh, mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal, dan mendorong pengembangan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Struktur organisasi ASPIKMAS yang terkoordinasi dengan baik dan kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah serta komunitas lokal menjadikan organisasi ini sebagai elemen vital dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng. Dengan strategi yang terfokus pada peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, dan penguatan akses pasar, ASPIKMAS tidak hanya membantu pelaku UMKM bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan era modern.

3.4. Hubungan Kemitraan

Dalam teori Weber, Lovrich, dan Gaffney, hubungan kemitraan dalam *Collaborative Governance* menggambarkan sebuah kolaborasi erat dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor, seperti pemerintah, sektor swasta, asosiasi UMKM, dan komunitas lokal, yang bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program-program kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama (Hardi, 2020).

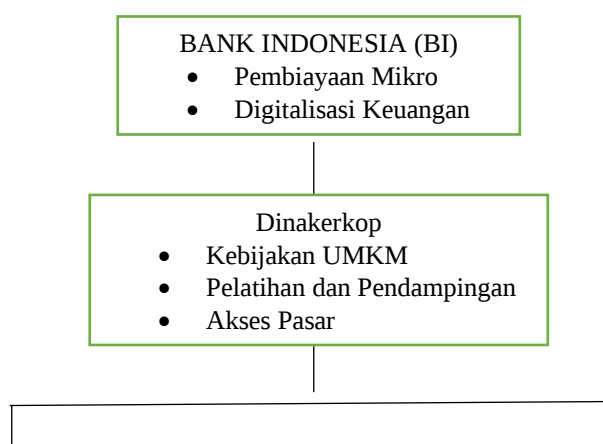


Table 5 pola relasi antara stakeholder

Sumber : Sekretaris Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas

Ada beberapa tantangan administratif yang masih perlu diperbaiki untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa pelatihan yang mereka terima membantu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk, meskipun masih diperlukan lebih banyak pendampingan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Evaluasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa program pelatihan dan pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinakerkop) telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Salah satu indikator keberhasilan adalah peningkatan jumlah UMKM yang menggunakan platform digital untuk transaksi dan pemasaran, serta meningkatnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Kedungbanteng. Namun, beberapa pelaku UMKM mengungkapkan bahwa akses ke program tersebut masih perlu diperluas, terutama untuk UMKM di daerah terpencil yang belum sepenuhnya merasakan manfaat kolaborasi ini.

Selain evaluasi dampak terhadap pelaku UMKM, penting untuk menilai sinergi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan ASPIKMAS, mereka merasa bahwa komunikasi antar stakeholder sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan program. Misalnya, perlu adanya jadwal pertemuan rutin untuk memonitor perkembangan program dan menyelesaikan perbedaan pandangan yang mungkin muncul. Pendekatan ini akan membantu menciptakan kolaborasi yang lebih inklusif dan efisien.

Kolaborasi yang sukses dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didukung oleh tiga elemen kunci yang saling terkait. Ketiganya merupakan landasan penting untuk memastikan tercapainya tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pertama, koordinasi yang efektif menjadi elemen utama dalam keberhasilan kolaborasi. Pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi seperti ASPIKMAS perlu menyelaraskan visi dan tujuan mereka agar tercipta sinergi yang optimal. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan indikator keberhasilan yang jelas dan spesifik. Dengan demikian, setiap pihak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran mereka masing-masing dalam mendukung keberhasilan program kolaborasi ini. Koordinasi yang baik juga akan mengurangi potensi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi menjadi pilar penting dalam mendorong transformasi UMKM. Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka, bahkan hingga ke skala regional dan internasional. Program pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi, seperti pengenalan platform digital untuk pemasaran dan manajemen bisnis, memungkinkan pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Teknologi tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan peluang baru yang sebelumnya sulit dijangkau oleh UMKM konvensional.

Peningkatan keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam setiap tahap kolaborasi merupakan faktor penting lainnya. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program, suara dan masukan dari pelaku usaha harus menjadi prioritas. Melibatkan mereka secara langsung tidak hanya meningkatkan relevansi program, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan tantangan nyata di lapangan dapat diakomodasi dengan baik. Umpan balik dari pelaku UMKM harus dijadikan dasar dalam merancang kebijakan dan program-program di masa mendatang agar lebih tepat sasaran. Dengan menggabungkan koordinasi yang efektif, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan aktif pelaku UMKM, kolaborasi ini dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, asosiasi UMKM seperti

ASPIKMAS, dan komunitas lokal berhasil menciptakan sinergi yang memperkuat ekosistem bisnis lokal. Integrasi dimensi vertikal dan horizontal memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian yang saling melengkapi, sehingga program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi UMKM.

Penerapan pendekatan ini memperluas akses pelaku UMKM terhadap permodalan dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan. Praktik evaluasi dan komunikasi yang efektif, seperti yang dilakukan ASPIKMAS, memperlihatkan pentingnya keterlibatan UMKM dalam menanggapi perubahan di lapangan.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah (1) peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dengan komunikasi yang lebih intensif, (2) perluasan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan UMKM, dan (3) evaluasi kolaborasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan kebutuhan. Dengan langkah-langkah ini, pengembangan UMKM di Kedungbanteng diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

REFERENCES

- Das, A. K. (2023). Collaborative governance. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1772–1775). Springer.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Hidayat, W. A., Hermani, A., & Budiatmo, A. (2022). Resiliensi Bisnis pada UMKM Batik Balqis Semarang di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 11(2), 207–213.
- Hu, X., Dai, M., DeValve, M. J., & Lejeune, A. (2020). Understanding public attitudes towards the police: Co-variates of satisfaction, trust, and confidence. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 62(1), 26–49.
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial Dan Collaborative Governance. *Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 103–116.
- Maulana, M. F. A., Putri, S. W., & Ariesmansyah, A. (2024). Analisis *Collaborative Governance* di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4986–5004.
- Maulia, E. I. (2023). *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis dampak digitalisasi desa wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404–418.

- Mukhirto, M., Dwijayanto, A., & Fathoni, T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(1), 23–35.
- Nur, M. I., Juana, T., Ningrum, E. W., & Sutisna, S. (2022). Collaborative Governance in the UMKM Juara Program as an effort to increase the competence of West Java Enterprises. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(1), 1–16.
- Riyanto, D. N. A. R., & Alfirdaus, L. K. (2024). Tantangan Dan Hambatan Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kebumen (Studi Kawasan Geopark Kebumen). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 374–391.
- Witjaksana, B., Purwanti, A., Fathoni, T., & Dewi, D. D. (2024). Increasiation Economic Management Literacy For The Community Through The Independent Entrepreneurship Program. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6207–6215.
- Yopanggi, R., & Setiawan, B. (2022). Peran dan Pengelolaan BUMDes Anugerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pajar Bulan, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(01), 37–40.